

Unofficial Translation

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to convey the Instrument of Ratification of the Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities, done at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 12 November 2010.

The Ministry also wishes to inform that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, March 2016

THE ASEAN SECRETARIAT	
RECEIVED 02	EMAIL 4
DATE 7/4/16	TIME 10.00

ASEAN Secretariat
Jakarta



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

N.D/00886/03/2016/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Piagam Pengesahan atas Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN, yang ditandatangani di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 12 November 2010.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberitahukan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 31 Maret 2016



Sekretariat ASEAN
Jakarta

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

No. 05/KA/03/2016/IR

PIAGAM RATIFIKASI

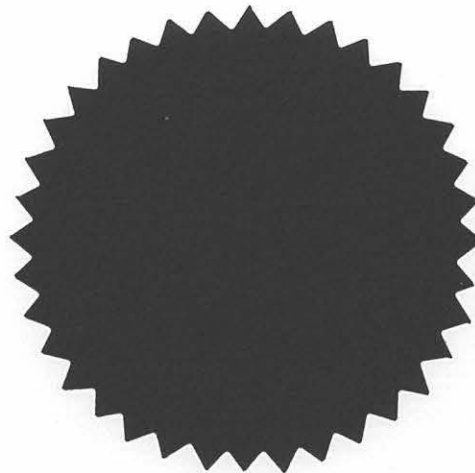
MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN, pada tanggal 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam;

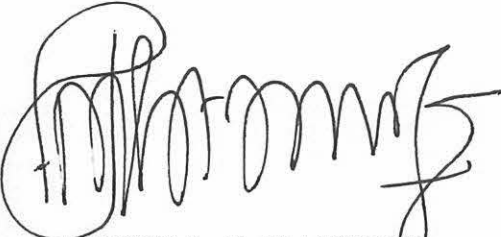
DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang, Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN, Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Kota-Kota di ASEAN;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Ratifikasi ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *tiga puluh satu* bulan *Maret* tahun dua ribu enam belas.




RETNO L. P. MARSUDI

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 05/KA/03/2016/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION


WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities, on 12 November 2010 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 paragraph 2 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 12 year 2016 concerning Ratification of ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services, Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities, Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between any ASEAN Cities;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *thirty-first* day of *March* in the year two thousand and sixteen.



RETNO L. P. MARSUDI